



SJMB: *Scientific Journal of Management and Business*.
Volume 02 Nomor 01 Tahun 2021 ; p-ISSN: 2776-009X ; online -ISSN: 2807-5897
Available online at <http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sjmb>

Received: Juni, 2021	Accepted: September, 2021	Published : Oktober, 2021
----------------------	---------------------------	---------------------------

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN NAGEKEO

Hipolitus Tue Wula, Gabriel Tanusi, Lambertus Langga
Program Studi Manajemen, Universitas Flores
E-mail: hippolitustuewula@gmail.com

Abstrak

The purpose of this study was to determine the financial performance of Nagekeo Regency seen from the decentralization degree ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio, regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio, and regional financial efficiency ratio. This type of research is descriptive qualitative and quantitative research. Qualitative data, namely data presented in the form of verbal words instead of numbers, which means qualitative data in this study is a general description of the object of research, including a brief history of its establishment, geographical location, objects, vision and mission, and organizational structure. and quantitative data, types of data that can be measured directly in the form of information or explanations expressed in numbers or numbers. In this case the quantitative data required is the 2014-2018 Regional Budget Realization Report. The results of this study indicate that (1) the ratio of the degree of decentralization can be categorized as Very Less, because it is still in the interval scale of 00.00% -10.00%. Consecutively from 2014 to 2018 the ratios were: 4.62%; 4.55%; 4.11%; 6.08%; and 4.43%. (2) The Ratio of Regional Financial Independence is still very low and the pattern of the relationship is Instructive, because it is still included in the 0% -25% interval. Consecutively from 2014 to 2018 the ratios were: 4.85%; 4.77%; 4.34%; 6.48%; and 4.75%. (3) The effectiveness ratio of PAD is known that the financial effectiveness of the DPPKAD Nagekeo Regency in 2016 is effective because its effectiveness is still below 100%, which is 95.67%. 2014, 2015, 2017, and 2018 were very effective because the value obtained was more than 100%, namely 102.81%; 107.83%; 100.01%; and 105.37%. (4)

Kata kunci: Decentralization degree ratio, Regional financial dependency ratio, Regional financial independence ratio, Regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio, and Regional financial efficiency ratio

Pendahuluan

) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi Daerah (Otda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Jika semangat kedua undang-undang tersebut diwujudkan, maka tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi wewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Menurut Indra (dalam Rukayah et al., 2017) otonomi yang diberikan kepada daerah meliputi empat aspek utama, yaitu otonomi politik, otonomi hukum, otonomi ekonomi, dan otonomi budaya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Gisa et al., 2019) sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi dan karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah.

Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio yang digunakan terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas terhadap PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan Belanja Daerah.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan daerah yang memiliki potensi daerahnya yang relatif sama. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana posisi keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nagekeo akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Nagekeo adalah melakukan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah,

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan daerah yang memiliki potensi daerahnya yang relatif sama. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana posisi keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Berikut adalah data laporan Keuangan kabupaten Nagekeo dari tahun 2014- 2018 .

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Kabupaten Nagekeo

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pendapatan	540,116,425,000	660.712.078.657,63	752,686,337,383	774,518,052,100	700,517,212,644
1	Pendapatan Asli Daerah	23,945,256,000	26.540.539.098,63	31,015,364,633	46,160,609,301	29,276,706,505
2	Pendapatan Transfer	515,149,969,000	632.921.539.559	720,420,972,750	726,585,442,799	657,411,506,139
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,021,200,000	1.250.000.000	1,250,000,000	1,772,000,000	13,829,000,000
B	Belanja	604,672,871,462.13	689.826.361.491,22	867,685,551,382.24	838,522,761,259.21	787,056,405,847.94
1	Belanja Operasi	448,488,439,125	413.008.033.679	463,089,252,769	473,490,739,713.21	491,639,841,888.94
2	Belanja Modal	141,375,761,101	270.464.980.321	290,144,011,513	235,858,604,546	164,954,078,059
3	Belanja Tak Terduga	14,808,671,236.13	6.353.347.491,22	1,927,899,900.24	2,500,000,000	3,400,000,000
4	Transfer	-	72.256.055.200	112,524,387,200	126,673,417,000	127,062,485,900
	Surplus/Defisit	(64,556,446,462.13)	(101.370.338.033,59)	(114,999,213,999.24)	(64,004,709,159.21)	(86,539,193,203.94)

Sumber: BKD Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan pada data laporan keuangan di atas diketahui bahwa pendapatan transfer lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dari Kabupaten Nagekeo sendiri selama empat tahun berturut-turut. Hal ini menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi masih cukup tinggi sehingga perlu adanya suatu usaha untuk mengurangi atas sumber dana eksternal dengan cara mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo yang terletak di Danga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen–dokumen misalnya Laporan keuangan periode 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio derajat dsentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD

Kabupaten Nagekeo dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2014-2018 Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo pada penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas

PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo, dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Nagekeo. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Perhitungan Rasio DD DPPKAD Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DD (%)	Kemampuan Keuangan
2014	24,618,925,077.46	532,770,485,066.46	4,62	Sangat Kurang
2015	28.618.512.239,25	629.109.735.892,25	4,55	Sangat Kurang
2016	29,671,653,790.77	722,085,467,322.77	4,11	Sangat Kurang
2017	46,163,603,353.96	759,738,196,694.67	6,08	Sangat Kurang
2018	30,850,179,938.54	696,630,225,672.54	4,43	Sangat Kurang

Sumber: DPPKAD Kabupaten Nagekeo (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi pada DPPKAD Kabupaten Nagekeo sebesar 4,62%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4,55%, tahun 2016 terjadi lagi penurunan menjadi 4,11%. Terjadi kenaikan pada tahun 2017 menjadi 6,08%, namun terjadi penurunan lagi di tahun 2018 menjadi 4,43%.

Hasil Rasio Derajat Desentralisasi mengalami peningkatan pada tahun 2017 namun bila dilakukan rata-rata rasio selama lima tahun terakhir (tahun 2014-2018), maka angka rasio mencapai 4,76% masuk dalam skala interval 00,00%-10,00% (sangat kurang). Hal Ini menunjukkan bahwa jumlah PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Hasil dari perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio KKD DPPKAD Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	PT (Rp)	TPD (Rp)	KKD (%)	Ketergantungan Keuangan
2014	507,171,759,989	532,770,485,066.46	95,20	Tinggi
2015	600.386.660.753	629.109.735.892,25	95,43	Tinggi
2016	683,646,256,443	722,085,467,322.77	94,68	Tinggi
2017	712,766,182,340.71	759,738,196,694.67	93,82	Tinggi
2018	649,559,485,067	696,630,225,672.54	93,24	Tinggi

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Nagekeo (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Nagekeo jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikategorikan tinggi. Dimulai dari tahun 2014 Rasio Ketergantungan Daerah dengan besarnya persentase 95,20%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan besarnya persentase 95,43%. Terjadi penurunan pada tahun 2016 dengan besarnya persentase 94,68%, mengalami penurunan lagi pada tahun 2017 dengan besarnya persentase 93,82%, dan terjadi penurunan pula pada tahun 2018 dengan besarnya persentase 93,24%.

Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami penurunan, namun bila dilakukan rata-rata rasio selama lima tahun terakhir (tahun 2014- 2018), maka angka rasio mencapai 94,47% masuk dalam skala interval 75%- 1000% (tinggi). Ini menunjukkan bahwa Ketergantungan Keuangan Daerah selama lima tahun, Pemerintah Kabupaten Nagekeo memiliki rata-rata ketergantungan tergolong tinggi. Hal ini karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagekeo dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio KKD DPPKAD Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	PT (Rp)	KKD (%)	Pola Hubungan
2014	24,618,925,077.46	507,171,759,989	4,85	Instruktif
2015	28.618.512.239,25	600.386.660.753	4,77	Instruktif
2016	29,671,653,790.77	683,646,256,443	4,34	Instruktif
2017	46,163,603,353.96	712,766,182,340.71	6,48	Instruktif
2018	30,850,179,938.54	649,559,485,067	4,75	Instruktif

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Nagekeo (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 diatas kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo dikategorikan kemampuannya rendah sekali dan pola hubungan instruktif dimana pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat besar untuk mengoptimalkan PAD pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai terendah terjadi pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 4,34% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,48%. Sedangkan tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2014, 2015, dan 2018 masing-masing sebesar: 4,85%, 4,77%, dan 4,75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih tinggi.

Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan pada tahun 2017 namun bila dilakukan rata-rata rasio selama lima tahun terakhir (tahun 2014-2018), maka angka rasio mencapai 5,04% masuk dalam skala kemandirian 0%-25% (rendah sekali (instruktif)). Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagekeo dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo secara keseluruhan dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih dibutuhkan. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Nagekeo sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio EPAD DPPKAD Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2014 - 2018

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2014	23,945,256,000	24,618,925,077.46	102,81	Sangat Efektif
2015	26.540.539.098,63	28.618.512.239,25	107,83	Sangat Efektif
2016	31,015,364,633	29,671,653,790.77	95,67	Efektif
2017	46,160,609,301	46,163,603,353.96	100,01	Sangat Efektif
2018	29,276,706,505	30,850,179,938.54	105,37	Sangat Efektif

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Nagekeo (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo pada tahun 2016 dikatakan efektif, karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu 95,67%. Untuk tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018 sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 102,81%, 107,83%, 100,01, dan 105,37%.

Hasil Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan pada tahun 2016 namun bila dilakukan rata-rata rasio selama lima tahun terakhir (tahun 2014-2018), maka angka rasio mencapai 102,338% masuk dalam skala kinerja keuangan 100%-keatas (sangat efektif). Hal ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil mengalami peningkatan. Namun untuk tetap mempertahankan hasil tersebut, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio EKD DPPKAD Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2014 - 2018

Tahun Anggaran	Realiasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2014	491,654,337,359	532,770,485,066.46	92,28	Kurang Efisien
2015	540.511.562.993,60	629.109.735.892,25	85,92	Cukup Efisien
2016	775,936,291,838.80	722,085,467,322.77	107,46	Tidak Efisien
2017	736,553,625,109.94	759,738,196,694.67	96,95	Kurang Efisien
2018	719,985,970,970.34	696,630,225,672.54	103,35	Tidak Efisien

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Nagekeo (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 diatas Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Nagekeo pada tahun 2015 tergolong cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%, ini terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah.

Tahun 2016 dan 2018 tergolong tidak efisien karena interval efisiennya diantara 100% keatas. ini terjadi karena realisasi belanja daerah melebihi realiasi pendapatan daerah. Pada tahun 2014 dan 2017 tergolong Kurang Efisien karena interval efisiensinya diantara 90%-100%, ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah. Hasil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 97,192% berada pada interval rasio 90%-100%, diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2016 dan 2018. Meskipun pada tahun 2016 dan 2018 tersebut Pemerintah Kabupaten Nagekeo sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%. Berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rasionya masing-masing sebesar: 4,62%; 4,55%; 4,11%; 6,08%; dan 4,43%.
2. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rasionya masing-masing sebesar: 4,85%; 4,77%; 4,34%; 6,48%; dan 4,75%.
3. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo tahun 2016 berjalan Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% yaitu sebesar 95,67%. Tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018 Sangat Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 102,81%; 107,83%; 100,01%; dan 105,37%.
4. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Nagekeo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 97,192% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rasionya masing-masing sebesar: 92,28%; 85,92%; 107,46%; 96,95%; dan 103,35%.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga

program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat dari penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Nagekeo. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

- April, P., Akuntansi, J. R., Hendawati, H., Komarasakti, D., Ansori, S., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Buana-ypkp, U. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Daerah. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Daerah, 5(3), 1643–1655.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9229>
- Gisa, L. R. K. A. K., Apparatus, Review, A., Agency, M., & Plan, W. (2019). Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (Studi Kasus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). 1 (1).
- Kaunang, C. E., & Naukoko, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16 (2), 355–365.
- Kinerja, B. (2013). Pengelolaan Sistem keuangan Daerah dengan sistem Anggaran. 377–385.
- Mone.dkk. (2013). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep. Jurnal Akuntansi.
- Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. Sosiohumaniora, 18(3), 253.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075>
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Jurnal Akuntansi, 4 (2), 1–11.
- Sukesti, F., & Alfasadun. (2011). Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik dan Good Governance. Jurnal Ilmiah Program Studi Akuntansi, 2(1), 1–12.
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (2), 146–157.
- Sultan, M. (2014). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran. Jurnal Academica Fisip Unrad, 06 (01), 1141–1148.